

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecukupan pangan merupakan tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 264,16 juta jiwa (BPS, 2019). Seiring dengan peningkatan populasi, diperkirakan kebutuhan pangan di Indonesia juga akan terus meningkat. Ketahanan pangan adalah salah satu tujuan dunia, namun banyak negara berkembang di Afrika dan Asia mengalami kerawanan pangan termasuk Indonesia (Frayne dan McCordic, 2015). Di Indonesia, ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam agenda Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, sehingga capaian keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tentunya selalu ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tersedianya pangan yang cukup secara wilayah belum tentu menjamin tidak terjadinya masalah kerawanan pangan pada rumah tangga. Karena selain pilar ketersediaan pangan, juga perlu diperhatikan dua pilar lainnya yaitu keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan (FAO, 1996). Menurut Moeloek (1999), kecukupan gizi merupakan salah satu aspek dalam pilar pemanfaatan pangan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan masyarakat dan pencapaian pemerintah dalam membangun indikator ekonomi, sosial pertanian, dan kesehatan. Jika terjadi ketidakcukupan konsumsi gizi seorang individu dari standar

kecukupan gizi minimum akan berdampak pada kondisi kesehatan, aktivitas, dan produktivitas kerja.

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 5,01 juta jiwa pada tahun 2018 (BPS, 2018b:18). Provinsi NTB merupakan salah satu wilayah surplus pangan. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan produksi padi yang surplus (peringkat ke-11 nasional). Begitu pula dengan ketersediaan pangan hewani dan nabati yang cenderung meningkat (BKP, 2019). Hasil Susenas Maret 2018 menyatakan jika secara agregat rata-rata konsumsi pangan penduduk NTB adalah 2.316,43 kkal dengan rata-rata pangsa pengeluaran pangan sebesar 57,19 persen (BPS, 2018c:16, 32-33). Namun, pada tahun yang sama Provinsi NTB ditetapkan sebagai daerah rawan gizi buruk oleh Kementerian Kesehatan dan menempati peringkat ke-2 angka gizi buruk dari 34 Provinsi di Indonesia. Temuan ini didukung dengan hasil Pemantauan Status Gizi oleh Dinas Kesehatan NTB bahwa angka prevalensi kurang gizi meningkat dari angka 22,6 pada tahun 2017 menjadi 29,5 persen pada tahun 2018. Hasil Survei Riskesdas juga menemukan kondisi yang serupa, yaitu sebanyak 38 persen balita dan penduduk usia produktif di NTB masih mengkonsumsi kalori dibawah kebutuhan minimum yang direkomendasikan (Kemenkes, 2018). Aspek kecukupan gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran pemanfaatan pangan, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah dalam pemanfaatan pangan pada level rumah tangga di Provinsi NTB.

Seorang perempuan (ibu) menempati posisi yang sangat strategis dalam rumah tangga, salah satunya adalah dalam hal pemenuhan gizi rumah tangga (Kitalyi, 1998). Sejalan dengan tujuan ke-4 dari SDGs yaitu mencapai kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, perempuan sudah tidak lagi dianggap sebagai pengurus rumah tangga. Akan tetapi, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki didalam meningkatkan perekonomian rumah tangga. Peran perempuan tidak hanya sebatas peran domestik dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai peran publik yang keberadaannya di pasar tenaga kerja (Rustiani, 1996). Ibnouf (2009) juga menyatakan bahwa ibu rumah tangga mempunyai peran penting untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangganya. Dalam peran domestiknya, seorang ibu berkontribusi pada proses produksi makanan serta meningkatkan kualitas makanan dan keragaman konsumsi. Sedangkan dalam peran publik, ibu yang bekerja cenderung mengalokasikan sebagian besar dari penghasilan mereka untuk membeli makanan dan kebutuhan dasar bagi anak-anak dan keluarga mereka (Levin, dkk., 1999).

Beberapa penelitian di negara berkembang menemukan hubungan positif dan kuat antara literasi dan tingkat pendidikan ibu terhadap tingkat gizi anak-anak [sebagai contoh, Skoufias (1999), Borooh (2004), dan Ramachandran (2007)]. Pena, dkk. (2000) dalam penelitiannya juga menemukan bukti bahwa peningkatan pendidikan perempuan memiliki dampak yang sangat berarti pada gizi anak-anak. Perempuan yang berpendidikan dinilai mampu mengukur kebutuhan gizi masing-masing individu di dalam rumah tangganya sesuai dengan beban kebutuhan nutrisi yang bervariasi dan memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada anak-anak mereka (Del Nino dkk., 2003; Beyene dan Muche, 2010). Hal ini bertentangan dengan Penders dkk. (2000) yang menemukan bahwa pendidikan ibu secara formal tidak berdampak terhadap status gizi anak secara signifikan.

Thomas dkk. (1991) dalam penelitiannya menemukan jika tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu. Hal ini dapat terjadi ketika memasukkan variabel akses internet (akses informasi) ke dalam model penelitian. Menurut data BPS, pada tahun 2014 persentase penduduk Provinsi NTB usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet 10,6 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 28,31 persen. Peningkatan penggunaan internet ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (BPS, 2018c:125). Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi, termasuk untuk mengakses informasi terkait pengetahuan gizi.

Masalah kerentanan pangan dan kemiskinan menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemprov NTB dari waktu ke waktu. BPS (2018a:76) dalam publikasinya menjelaskan bahwa angka kemiskinan di NTB masih tergolong tinggi yaitu sebesar 14,75 persen. Menurut Bappenas (2014), kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang penanganannya memerlukan program dan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi angka kerentanan pangan dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus, diantaranya adalah program bantuan sosial antara lain: Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sari, dkk. (2019) menyatakan jika program RASTRA/RASKIN pada tahun 2015 belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. Dari hasil kajian ditemukan jika pemberian RASKIN memberikan dampak negatif sehingga mengurangi peluang ketahanan pangan sebesar 11% dan meningkatkan kemungkinan kerawanan pangan sebesar 6%.

Pada umumnya, penelitian tentang ketahanan pangan selalu berfokus kepada faktor penentu ketahanan pangan. Omotesho, dkk. (2008) menyebutkan ukuran rumah tangga dan *food expenditure* berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Bashir, dkk. (2012) menyatakan bahwa pendapatan dan tingkat pendidikan kepala keluarga di wilayah pedesaan memiliki dampak positif pada ketahanan pangan rumah tangga, sedangkan umur kepala keluarga dan ukuran keluarga memiliki dampak negatif. Sementara, Faridi dan Wadood (2010) serta Akerele dkk. (2014) dalam penelitiannya menemukan variabel pendapatan, pengeluaran untuk makanan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, kondisi tempat tinggal, dan status pekerjaan sebagai faktor penentu ketahanan pangan rumah tangga.

Uraian di atas menegaskan bahwa faktor penentu ketahanan pangan rumah tangga dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah berbeda-beda. Demikian pula, hasil penelitian juga berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian tentang ketahanan pangan dengan menonjolkan peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga masih cukup relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi cakupan faktor penentu yang lebih luas yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan demografi dengan lebih menonjolkan pada peran ibu rumah tangga berdasarkan pekerjaan, usia, tingkat pendidikan, dan akses informasi serta melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Perbedaan lainnya ialah dari segi data dan metode yang digunakan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data pada level rumah tangga berdasarkan hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada Maret 2018. Penelitian ini dianalisis dengan regresi logistik multinomial karna variabel terikat dalam penelitian ini bersifat kategorik dan memiliki empat kategori.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian berbagai fenomena dalam latar belakang diatas menghasilkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: apakah karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial serta kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi NTB?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, dapat diuraikan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial serta kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi NTB.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, dalam hal:

1. Memberikan gambaran mengenai ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi NTB dan faktor penentunya.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan/strategi khususnya dalam menangani masalah ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi NTB.
3. Memberikan kontribusi untuk memperkaya studi empiris dan menambah referensi kajian ilmiah yang berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis hubungan antarvariabel penelitian dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial. Penelitian ini hanya akan menganalisa ketahanan pangan dari aspek pemanfaatan pangan (*utilization of food*) yang saat ini memang masih sangat jarang untuk diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini juga menganalisis karakteristik ekonomi, demografi, dan sosial dari rumah tangga dengan anggota rumah tangga perempuan usia produktif (15-64 tahun) berstatus menikah di Provinsi NTB. Wilayah NTB dipilih menjadi obyek penelitian karena di NTB sebagai daerah surplus pangan, masih ditemukan banyak rumah tangga yang masih rentan pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan pangan di wilayah NTB belum maksimal. Pengukuran ketahanan pangan rumah tangga dalam penelitian ini didekati dengan metode pengukuran menurut Jonsson dan Toole (1991) yaitu indikator pangsa pengeluaran pangan dari aspek ekonomi dan kecukupan konsumsi kalori dari aspek gizi. Data yang digunakan bersumber dari data Susenas oleh BPS Provinsi NTB pada satu titik waktu tahun 2018 dengan jumlah observasi sebanyak 5.487 rumah tangga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.

1.6 Sistematika Tesis

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, yang disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika tesis.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka mencakup landasan teori, konsep dan definisi terkait tingkat ketahanan pangan termasuk juga membahas hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk menyusun kerangka konseptual, hipotesis dan model analisis.
3. Bab ketiga, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengolahan data, metode pengumpulan data, teknik analisis serta kriteria pengujian/pengukuran hipotesis.
4. Bab empat, hasil dan pembahasan akan mendiskusikan kondisi umum rumah tangga dalam beberapa aspek yang diteliti, hasil estimasi regresi logistik multinomial dan pembahasannya.
5. Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan, implikasi penelitian dan diakhiri dengan membahas keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian berikutnya.